

The Role of the Village Government in Preventing Stunting in Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency

[Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo]

Yiyin Antias Wahyuningsih¹⁾, Ilmi Usrotin Choriyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to “evaluate and explain the function of village government in Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency in reducing stunting.” This study was conducted using a qualitative descriptive methodology. Interviews, observations, notes, and primary and secondary sources of information were used in the data collection process. The authors used a purposive sampling method to select village cadres, cadre leaders, civil servants, and integrated health posts (Posyandu). They used the steps outlined by Miles and Huberman for data analysis, which include data collection, data cleaning, data presentation, and drawing conclusions. The existing findings describe the Tropodo Village government as the first to provide. Posyandu equipment. Second, the availability of the budget allocated by the Tropodo Village government for stunting prevention activities; third, partnerships where health workers teach about how to prevent stunting; and fourth, community participation where people in Tropodo Village support this program.*

Keywords – Role; Village Government; Stunting Prevention

Abstrak Tujuan penelitian ini ialah “untuk mengevaluasi dan menjelaskan fungsi pemerintah desa di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi stunting.” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi, catatan, dan sumber informasi primer maupun sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Penulis menggunakan metode sampel bertujuan untuk memilih kader desa, pemimpin kader, pegawai negeri, dan pos kesehatan terpadu (Posyandu). Mereka menggunakan langkah-langkah yang diuraikan oleh Miles dan Huberman untuk analisis data, yang meliputi pengumpulan data, pembersihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan yang ada menjabarkan pemerintah Desa Tropodo adalah yang pertama dalam menyediakan alat posyandu. Kedua, ketersediaan anggaran yang dialokasikan pemerintah Desa Tropodo untuk kegiatan pencegahan stunting; ketiga, kemitraan di mana petugas kesehatan mengajarkan tentang cara mencegah stunting; dan keempat, partisipasi masyarakat di mana orang-orang di Desa Tropodo turut mendukung program ini.

Kata Kunci – Peran; Pemerintah Desa; Pencegahan Stunting

I. PENDAHULUAN

Balita berada pada fase tumbuh kembang yang sangat cepat, baik dari segi kemampuan berpikir, berbicara, maupun fungsi pancaindra. Di sisi lain, kelompok usia ini juga cukup rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, sehingga pemenuhan gizi yang tepat menjadi hal penting untuk menunjang proses pertumbuhannya [1]. Penyakit, kematian, perkembangan motorik dan kognitif yang terhambat, dan penurunan produktivitas di masa depan adalah beberapa kemungkinan akibat bagi balita yang tidak mencapai potensi penuhnya dalam hal pertumbuhan [2]. Kondisi yang dikenal sebagai stunting adalah salah satu masalah paling umum yang dihadapi balita.

Nutrisi yang tidak memadai selama kehamilan dan 24 bulan pertama kehidupan dapat menyebabkan stunting, suatu jenis keterlambatan pertumbuhan [3]. Indeks Tinggi Badan untuk Usia (H/A) adalah indikator yang digunakan untuk mendiagnosis anak-anak yang mengalami stunting menurut kriteria WHO [4]. Asupan makanan yang tidak memadai selama masa janin atau bayi menyebabkan stunting, suatu kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada anak-anak lain seusianya [5]. Karena dampaknya yang merugikan baik sekarang maupun di masa depan, kekurangan gizi adalah masalah yang harus diatasi oleh semua negara. Hilangnya daya saing, kemiskinan, dan tingginya angka pengangguran adalah dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

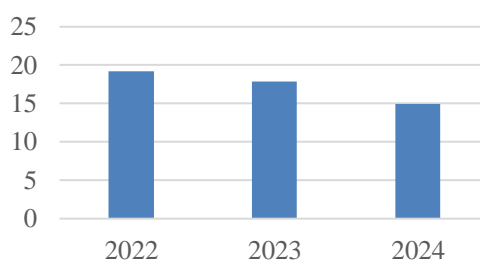
Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam pembangunan suatu negara. Hal ini terlihat dari konsumsi makanan yang cukup pada balita, yang pada gilirannya mencerminkan status gizi mereka. Beberapa variabel, termasuk gaya pengasuhan, situasi ekonomi, kondisi tempat tinggal, dan keterbatasan ketersediaan makanan sehat, berkontribusi pada masalah kekurangan gizi pada anak. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mengatasi berbagai jenis kekurangan gizi, dan mencapai *Zero Hunger*. Salah satu fokusnya adalah stunting, yang merupakan salah satu jenis stunting [2]. Pemerintah telah menyusun berbagai strategi

untuk menekan angka stunting di daerah dengan target penurunan hingga di bawah 20%. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Kondisi ini menyebabkan angka stunting tetap tinggi dan berpotensi memicu permasalahan kesehatan masyarakat yang lebih besar.

Jika kebutuhan nutrisi ibu hamil tidak terpenuhi secara memadai atau jika ia mengikuti pola makan yang tidak sehat, ia mungkin mengalami stunting. Tantangan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, khususnya selama kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan anak, diperparah oleh kurangnya pemahaman dan praktik diet yang tidak tepat. Koefisien kecerdasan (IQ) anak cenderung lebih rendah daripada anak dengan pertumbuhan normal karena keterlambatan pertumbuhan, yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif [6]. Stunting memiliki efek pada IQ anak selain perkembangan fisiknya. Seribu hari pertama kehidupan anak, dari saat pembuahan hingga anak berusia dua tahun, adalah yang paling penting untuk tujuan pencegahan. Selain pemenuhan gizi, aspek lain seperti tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, serta kebersihan juga berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Di samping itu, stunting juga dapat dipicu oleh penyakit infeksi, tidak hanya dipengaruhi oleh pola makan ibu.

Di Indonesia, stunting masih menjadi persoalan serius, bahkan pernah menempati angka prevalensi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yaitu sekitar 36,4%. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah federal telah menerapkan sejumlah undang-undang dan program di tingkat nasional, termasuk Program Kupon Pangan dan Inisiatif Harapan Keluarga (PKH). Angka stunting telah menurun secara signifikan sejak peraturan ini diberlakukan. Menurut statistik dari Badan Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting turun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 dan 17,8% pada tahun 2023, yang mengkonfirmasi temuan sebelumnya. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan angka stunting mencapai sekitar 14%.

Diagram 1. Prevalensi Stunting di Jawa Timur Tahun 2022-2024



Sumber: Survei Status Gizi (SSG) 2024

Statistik menunjukkan bahwa stunting telah menurun secara signifikan di Provinsi Jawa Timur. Prevalensi stunting mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 19,2%, turun menjadi 17,9% pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 14,92% pada tahun 2024. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam penurunan keseluruhan yang memengaruhi seluruh Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Sidoarjo, salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur, telah membuat kemajuan besar dalam menurunkan prevalensi stunting. Dinas Kesehatan Sidoarjo melaporkan angka stunting sebesar 14,8% pada tahun 2021, 16,1% pada tahun berikutnya, dan penurunan tajam menjadi 8,4% pada tahun berikutnya. Kira-kira 34.000 anak, yang didefinisikan sebagai anak berusia antara 0 dan 59 bulan (atau di bawah lima tahun), mengalami stunting. Meskipun telah ada peningkatan yang nyata, Kabupaten Sidoarjo harus terus menerapkan strategi yang berbeda untuk mengatasi stunting dengan cara terbaik dan jangka panjang.

Dalam upaya menekan prevalensi stunting, pemerintah menetapkan berbagai langkah strategis yang diwujudkan melalui pilar percepatan penurunan stunting. Melalui lima pilar tersebut, pemerintah berharap upaya penurunan dan pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga ke tingkat desa [7]. Terdapat lima pilar utama yang digunakan untuk mempercepat pengurangan stunting. Pilar pertama menekankan pentingnya komitmen dari atas ke bawah dan perencanaan jangka panjang untuk memerangi stunting. Meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat merupakan pilar kedua, yang mencakup kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Prinsip ketiga adalah integrasi program melalui konvergensi pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Meningkatkan gizi dan ketahanan pangan adalah tujuan utama pilar keempat. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan program mencapai tujuannya, pemantauan dan evaluasi merupakan pilar kelima.

Penanganan dan pencegahan stunting merupakan implementasi dari berbagai regulasi yang dijadikan pedoman dalam upaya penanganannya. Melalui pedoman tersebut, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara nasional. Beberapa regulasi yang menjadi dasar antara lain UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, PP No. 42 Tahun 2013, serta Permenkes No. 23 Tahun 2014 yang mengatur upaya perbaikan gizi, termasuk berbagai bentuk dukungan dalam pelaksanaannya [8].

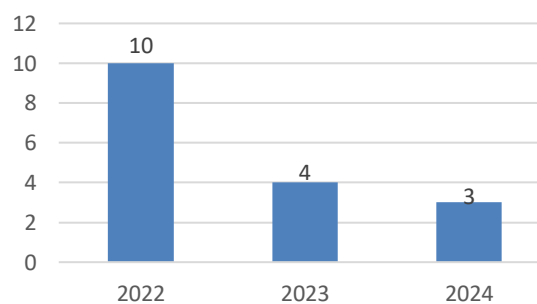
Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa turut berperan penting pada pencegahan stunting di tingkat desa. Sebuah dampaknya ialah penyaluran dana desa dari 2015 yang digunakan sebagai dasar penetapan prioritas

pembangunan, termasuk di bidang kesehatan. Dana tersebut dimanfaatkan, antara lain, untuk program perbaikan gizi sebagai langkah pencegahan stunting. Oleh karena itu, fungsi pemerintah desa menjadi sangat strategis untuk mendukung penurunan angka stunting.

UU Desa No. 6 Tahun 2014 ialah regulasi yang bertujuan melindungi serta mengakui kearifan lokal di tingkat desa. Hal ini mengakui hak-hak inheren masyarakat dan memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi, diskusi, dan kolaborasi timbal balik ditekankan dalam peraturan ini sebagai dasar pemerintahan desa [9]. Sebagai unit pemerintahan paling dasar, pemerintah desa memainkan peran penting dalam inisiatif pencegahan stunting, menurut penelitian [10]. Fungsi ini dapat dipenuhi dengan membina kemitraan antara bidan desa, pemuda setempat, dan pemerintah desa untuk mengembangkan dan melaksanakan inisiatif yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting.

Desa Tropodo, Kecamatan Krian, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan stunting pada balita. Akibatnya, pemerintah desa menghadapi kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengurangi stunting melalui program yang disesuaikan dengan kondisi lokal karena adanya korelasi kuat antara stunting dan status gizi serta kesehatan secara keseluruhan. Terdapat korelasi kuat antara kurangnya gizi yang tepat untuk balita dan kasus stunting di Desa Tropodo. Salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah pola pengasuhan yang kurang ideal. Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan diagram berikut:

Diagram 2. Data Balita Berisiko Stunting di Desa Tropodo, Krian Tahun 2022-2024



Sumber: Posyandu Tropodo, Kec. Krian (2025)

Angka kejadian stunting di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, menunjukkan tren penurunan, seperti yang terlihat pada tabel. Pada tahun 2022, terdapat sepuluh balita yang berisiko mengalami stunting; pada tahun 2023, jumlah tersebut turun menjadi empat; dan pada tahun 2024, turun lagi menjadi tiga. Keterlibatan pemerintah desa dalam menciptakan dan melaksanakan beberapa program pencegahan stunting merupakan faktor penyebab penurunan ini, menurut wawancara dengan para bidan Desa Tropodo. Di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, terdapat inisiatif dari pemerintah desa untuk membantu mencegah stunting. Program Posyandu Remaja di Desa Tropodo mulai diaktifkan pada tahun 2022 sebagai bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kesehatan remaja, khususnya remaja putri sebagai calon ibu. Program ini bertujuan “untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai gizi seimbang, kesehatan reproduksi, pencegahan anemia, serta pentingnya menjaga pola hidup sehat sejak usia dini.”

Pemerintah Desa Tropodo melihat bahwa pencegahan stunting tidak hanya dimulai saat kehamilan, tetapi juga sejak masa remaja, karena kondisi kesehatan calon ibu sangat memengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan. Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian tablet tambah darah, serta edukasi kesehatan, Posyandu Remaja menjadi langkah preventif dalam memutus rantai stunting antargenerasi. Program ini juga melibatkan kader kesehatan dan bekerja sama dengan tenaga medis dari puskesmas setempat. Dengan adanya program ini, pemerintah desa berperan aktif dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesehatan sebagai investasi masa depan.

Kelas Ibu Hamil di Desa Tropodo mulai dilaksanakan secara terstruktur sejak tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pemahaman ibu hamil mengenai kesehatan kehamilan dan pencegahan stunting sejak dalam kandungan. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pemenuhan gizi selama kehamilan, pemeriksaan rutin, persiapan persalinan, serta pentingnya pemberian ASI eksklusif. Pemerintah Desa Tropodo memfasilitasi kegiatan ini dengan menghadirkan bidan desa dan tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan serta konsultasi langsung kepada para ibu hamil. Dalam sesi ini, para ibu hamil mempelajari tentang bahaya stunting, berat badan lahir rendah, anemia, dan kondisi lain yang mungkin memengaruhi anak yang belum lahir. Inisiatif ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, memungkinkan pemantauan kondisi ibu hamil secara konsisten. Jelas bahwa pemerintah desa secara aktif terlibat dalam pencegahan stunting prenatal melalui Kelas Ibu Hamil.

Pada tahun 2022, Pemerintah Desa Tropodo mengintensifkan strategi mereka untuk menurunkan angka stunting, yang mencakup penguatan Program Pendamping Ibu Hamil. Ibu hamil, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang berada dalam kategori berisiko tinggi, akan menerima bantuan langsung melalui inisiatif ini. Pendampingan dilakukan oleh kader kesehatan desa yang bertugas memantau kondisi kesehatan ibu, memastikan kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen, serta membantu menghubungkan ibu hamil dengan layanan kesehatan jika diperlukan. Pemerintah desa berperan dalam koordinasi, pembinaan kader, serta penyediaan dukungan administrasi dan fasilitas pendukung. Dengan adanya pendampingan ini, deteksi dini terhadap permasalahan gizi atau kesehatan selama kehamilan dapat dilakukan lebih cepat. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan perhatian personal dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya stunting sejak masa kehamilan.

Posyandu Balita di Desa Tropodo telah berjalan secara rutin sejak tahun 2018 dan terus diperkuat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi anak usia 0–5 tahun. Program ini bertujuan “untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian imunisasi, serta penyuluhan gizi kepada orang tua.” Pemerintah Desa Tropodo berperan dalam mendukung operasional kegiatan, menyediakan sarana prasarana, serta menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kader posyandu. Melalui Posyandu Balita, kasus gizi kurang dan risiko stunting dapat terdeteksi lebih awal sehingga intervensi dapat segera dilakukan. Program ini juga menjadi media edukasi untuk orang tua tentang krusialnya pola asuh, pemberian makanan bergizi, dan kebersihan lingkungan. Dengan keberlangsungan Posyandu Balita, pemerintah desa menunjukkan peran strategis dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal menuju target Zero Stunting di Desa Tropodo.

Menurut penelitian, masih ada beberapa masalah di Desa Tropodo, Krian. Misalnya, kurangnya infrastruktur (tempat posyandu masih menggunakan rumah warga atau kepala RW), alat timbang yang rusak, kurangnya kursi tunggu (orang masih duduk di lantai), kurangnya keterlibatan masyarakat atau kesadaran tentang pencegahan stunting, pendanaan yang terlambat sehingga pencegahan stunting kurang optimal, dan faktor lingkungan (ada banyak pabrik tahu di daerah tersebut, yang menyebabkan pembakaran sampah plastik, yang mengganggu pencernaan dan berkontribusi pada stunting).

Berbagai studi terdahulu telah menelaah terkait “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting”, di antaranya yakni studi yang dilangsungkan oleh Regita dan Prathaman [10] di Desa Wedoro Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, asil penelitian tersebut menjabarkan pemerintah desa sudah melaksanakan perannya secara cukup baik melalui berbagai program, seperti pos gizi, sosialisasi bagi ibu hamil, serta pemberian imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi. Namun, keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga apabila ditemukan kasus stunting yang serius, kader kesehatan akan merekomendasikan penanganan lebih lanjut ke puskesmas atau tenaga kesehatan profesional. Sebagai bagian dari intervensi yang peka terhadap gizi, bantuan pangan dasar didistribusikan, KMS dan pos kesehatan terpadu (Posyandu) melakukan pemantauan rutin, dan kader penanggulangan stunting memberikan pendampingan. Sayangnya, kurangnya antusiasme masyarakat telah menyebabkan program konsultasi gizi daring kurang efektif. Selain itu, tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap air minum bersih dan fasilitas sanitasi.

Studi terdahulu oleh Suhroh dan Pradana [11] menunjukkan bahwa program Gopo (Gojek Posyandu) didukung oleh peran pemerintah desa melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti alat komunikasi, perlengkapan imunisasi, PMT gizi, dan timbangan yang bersumber dari dana desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, jarak tempuh yang jauh, serta minimnya sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Kemudian penelitian terdahulu oleh Azizah dan Agustin [12] yang berjudul “Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGs Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Sukodono dalam menekan stunting dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana posyandu, serta dukungan anggaran yang dialokasikan untuk program penurunan stunting. Selain itu, terdapat kemitraan antara pemerintah desa, petugas kesehatan, dan rumah sakit dalam pelaksanaan program.

Partisipasi masyarakat juga tergolong baik, ditunjukkan dengan dukungan aktif terhadap program penurunan stunting. Pemerintah desa turut melakukan sosialisasi, termasuk kepada calon pengantin, mengenai pentingnya pencegahan stunting.

Teori Yeti (2014) menjelaskan bahwa keoptimalan peran pemerintah dipengaruhi oleh empat indikator utama. Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai tahapan dasar untuk mewujudkan sebuah program. Fasilitas yang memadai akan mempermudah pelaksanaan program, sehingga pemerintah perlu memastikan ketersediaan, perawatan, dan pembaruan sarana prasarana agar berjalan optimal. Kedua, ketersediaan anggaran yang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program. Anggaran adalah alat untuk merencanakan, menilai, dan memantau kinerja pemerintah, di samping menjadi sumber pendapatan. Sebagai pilihan ketiga, kita memiliki kemitraan, di mana dua orang atau lebih bekerja sama menuju tujuan bersama. Kemitraan yang baik dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat, yang menjadi aspek

penting karena masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam kebijakan pemerintah. Tingkat keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program yang dijalankan.

II. METODE

Penelitian dalam studi ini bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan cermat terhadap partisipan dan tindakan mereka. Peneliti di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, memilih pendekatan ini karena ingin mempelajari keadaan sebenarnya seputar keterlibatan pemerintah desa dalam pencegahan stunting. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Yeti Heryati (2014), yang mencakup empat indikator berikut: ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, ketersediaan anggaran, kemitraan, dan partisipasi masyarakat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan desa dalam inisiatif pencegahan stunting. Partisipan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pengetahuan mereka tentang topik yang diteliti melalui penggunaan teknik purposive sampling.

Tiga metode digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini: dokumentasi, observasi, dan wawancara. Informan yang dikumpulkan untuk wawancara meliputi Bapak Haris Iswandi, S.Pt., kepala Desa Tropodo; Ibu Ima, kader pemberdayaan masyarakat; Ibu Dian, kepala Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu); dan Bapak Donny, seorang anggota staf pelayanan desa. Peneliti mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok bahasan sebagai hasilnya. Mengenai peran yang dimainkan masyarakat dalam pencegahan stunting, peneliti juga mencatat kondisi lapangan melalui pengamatan langsung. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi diringkas menggunakan prosedur dokumentasi untuk dijadikan bahan studi. Analisis data studi ini mengikuti metodologi empat langkah Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, pembersihan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pengurangan data dilakukan dengan mengidentifikasi data primer yang relevan, memilihnya dari proses penelitian, dan kemudian menarik kesimpulan dari analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua inisiatif pengelolaan stunting, termasuk di Desa Tropodo, dipandu oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang membahas Percepatan Mitigasi Stunting. Kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kegiatan pencegahan di Desa Tropodo dan komunitas lain di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Desa Tropodo telah bekerja sama dengan kader Posyandu, sebuah unit kesehatan terpadu, untuk meluncurkan kegiatan pencegahan stunting sejak tahun 2021. Sebagai fasilitas tambahan untuk pengelolaan stunting, wilayah desa memiliki delapan pos kesehatan. Pemerintah desa memainkan peran penting dalam mengurangi risiko stunting mengingat hal tersebut. Penelitian ini menerapkan teori Heryati (2014) pada fungsi ini, yang mempertimbangkan empat faktor: pendanaan, kolaborasi, keterlibatan masyarakat, dan aksesibilitas fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. Berikut penjelasan bagaimana fungsi pemerintah Desa Tropodo dianalisis menggunakan empat indikator tersebut:

A. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Keberadaan fasilitas dan infrastruktur yang mempermudah pelaksanaan program merupakan bukti keberhasilan Pemerintah Desa Tropodo dalam mengurangi stunting. Tujuan fasilitas dan infrastruktur adalah untuk mempermudah kelancaran operasional, sebagaimana dinyatakan oleh Yeti Heryati (2014). Di sini, infrastruktur dan fasilitas berpusat pada pos kesehatan (Posyandu) dan pelayanan kesehatan desa, termasuk hal-hal seperti alat pengukur tinggi dan berat badan, perlengkapan vaksinasi, dan perabot tambahan seperti meja dan kursi. Dengan menyediakan sumber daya ini, kami ingin membantu masyarakat Desa Tropodo mendapatkan akses yang lebih mudah ke perawatan medis dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam upaya memerangi stunting. Salah satu pernyataan terkait ketersediaan sarana dan prasarana tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Tropodo, Bapak Haris Iswandi, S.Pt, sebagai berikut :

“Kalau terkait sarana dan prasarana pihak pemerintah desa sudah memfasilitasi kebutuhan untuk kesehatan seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, kursi, meja dll. Kegiatan posyandu dilakukan di balai RW, namun ada beberapa pos yang masih meminjam teras rumah warga, alat-alat juga bisa dititipkan di rumah warga. Biasanya bidan desa atau kader posyandu membuat list cacatan keperluan yang dibutuhkan dalam posyandu dan list catatan tersebut di berikan kepada pihak pemerintah desa, kemarin juga pihak kader mengajukan kursi” (Hasil Wawancara Tanggal 16 Mei 2024).

Ibu Ima, seorang kader Posyandu dan kader pemberdayaan masyarakat, menyampaikan hal ini sebagai tambahan dari wawancara dengan Bapak Haris S., PT. Kata-katanya adalah:

“Pihak pemerintah desa sudah memberikan fasilitas yang kita perlukan untuk kegiatan kesehatan atau posyandu, kegiatan posyandu dilakukan di Balai RW, namun kebanyakan orang yang dari pribumi itu dilakukan

di teras rumah warga, dan alat-alat ditiptkan di rumah warga yang ditempati. Kalau terkait masalah sarana prasarana kita ada RSD, di mana RSD itu adalah wadah untuk para kakor-kakor untuk berkoordinasi yang terbentuk dari beberapa kader dan pemerintah desa di satukan lalu berdiskusi, misalnya di tiap-tiap posyandu tidak punya APE, lalu ketua kader ngelist apa saja yang dibutuhkan, atau misalnya timbangan rusak, nanti diajukan ke pemerintah desa, saat sudah diajukan ke pihak pemerintah desa, tidak langsung dibelikan melainkan digodok oleh panitia 11, panitia 11 terdiri dari kepala kader, bidan desa dan pihak dari pemerintah desa sendiri, di mana-mana kebutuhan mana yang bisa dibuat jangka panjang, kebutuhan mana yang harus langsung dibelikan, atau yang bisa ditunda beberapa bulan lagi seperti itu. Terkait kursi memang kurang tapi saya sudah mengajukan ke pemerintah desa” (Hasil Wawancara Tanggal 09 Juli 2024).

Data wawancara menunjukkan bahwa Desa Tropodo memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mempertahankan pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu). Bidan desa bertanggung jawab mengumpulkan data tentang kebutuhan yang diperlukan, yang kemudian secara aktif dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ketersediaan fasilitas yang komprehensif menunjukkan dukungan yang kuat dari pemerintah desa. Inisiatif pencegahan stunting dapat dilakukan lebih efektif jika fasilitas dan infrastruktur yang memadai tersedia untuk mendukung operasional Posyandu. Sayangnya, masih terdapat beberapa kekurangan meskipun fasilitas dan infrastruktur sudah memadai. Misalnya, lokasi kegiatan Posyandu masih dipinjam dari rumah warga, peralatan masih ditinggalkan di sana, alat timbang rusak, dan tidak cukup kursi tunggu, sehingga warga masih duduk di lantai. Berikut informasi tentang infrastruktur dan fasilitas yang ditawarkan Desa Tropodo:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Posyandu Kemuning

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Timbangan	8
2.	Alat Ukur Tinggi Badan	8
3.	Lingkar Kepala	8
4.	Lingkar Perut	8
5.	Kursi	8
6.	Meja	8
7.	APE (Alat Peraga Edukasi)	8
8.	Alat Imunisasi	8
9.	Termometer	8

Sumber : Data Diolah Oleh Posyandu Kemuning (2024)

Berdasarkan temuan penelitian, indikator ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Tropodo memang sudah tergolong cukup baik, tapi masih bisa dijumpai kekurangan yang harus diperhatikan. Kondisi yang belum sepenuhnya optimal ini berpotensi menghambat upaya pencegahan stunting sehingga belum mampu mencapai target yang diharapkan, seperti zero stunting. Oleh karena itu, peningkatan dan pemenuhan sarana serta prasarana perlu terus dilakukan secara optimal agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik. Dengan fasilitas yang memadai, pemerintah desa juga akan lebih mudah untuk menerapkan program yang sudah diwacanakan agar bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Temuan tersebut berbeda terhadap studi yang berjudul “Peran Desa Dalam Menekankan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGS Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo” [12] yang menjabarkan untuk berhasil melaksanakan program pengurangan stunting, pemerintah Desa Sukodono telah memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi angka stunting. Layanan kesehatan desa, pos layanan kesehatan terpadu (Posyandu), dan perlengkapan vaksin, timbangan, serta alat pengukur tinggi badan ditempatkan di lembaga-lembaga ini. Bidan desa dan petugas Posyandu termasuk di antara tenaga kesehatan yang bekerja bersama dengan lembaga-lembaga ini. Tujuan penyediaan fasilitas tersebut adalah untuk mempermudah masyarakat Desa Sukodono dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga program penurunan stunting dapat terlaksana secara optimal. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan, khususnya pada minggu pertama setiap hari Senin melalui kegiatan posyandu di Desa Sukodono.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam peran Pemerintah Desa Tropodo terhadap pencegahan stunting secara umum telah relevan terhadap teori yang dijabarkan Yeti Heryati (2014), yang menyatakan sarana dan prasarana ialah fasilitas yang diterapkan dalam menunjang dan memfasilitasi pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya berbagai fasilitas penunjang kegiatan posyandu seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, alat imunisasi, meja, kursi, APE, dan termometer yang masing-masing berjumlah delapan unit sebagaimana tercantum dalam data Posyandu Kemuning Tahun 2024. Selain itu, mekanisme pengajuan kebutuhan melalui pencatatan oleh bidan desa dan kader posyandu serta pembahasan bersama

dalam forum koordinasi menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang terstruktur. Namun demikian, meskipun secara substansi telah memenuhi unsur ketersediaan fasilitas pendukung, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti penggunaan teras rumah warga sebagai lokasi posyandu, penitipan alat di rumah warga, adanya timbangan yang rusak, serta keterbatasan kursi tunggu. Dengan demikian, indikator ini dapat dikatakan cukup sesuai dengan teori, tetapi masih memerlukan peningkatan dan optimalisasi supaya implementasi program pencegahan stunting bisa berlangsung secara efektif dan mendukung target zero stunting secara maksimal.

B. Ketersediaan Anggaran

Pemerintah di tingkat negara bagian dan federal mentransfer dana ke tingkat lokal masing-masing. Dana yang dialokasikan untuk desa sebagian besar akan digunakan untuk mendukung inisiatif yang mencakup berbagai sektor. Dana komunitas diharapkan memberikan manfaat yang substansial jika dibentuk secara legal. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk layanan publik, kesejahteraan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, sangat bergantung pada ketersediaan anggaran (Mea, 2020). Anggaran desa, seperti yang diusulkan oleh Yeti Heryati (2014), adalah mekanisme untuk membiayai tata kelola, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang diambil dari Anggaran Daerah (APBD) dan disalurkan melalui rekening kas lokal. Anggaran desa juga penting secara strategis karena mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, yang sangat penting untuk inisiatif seperti program padat karya yang menyoroti bakat lokal. Di satu sisi, anggaran desa dapat meningkatkan hasil dan infrastruktur masyarakat; di sisi lain, dapat meningkatkan kesadaran politik tentang hak-hak masyarakat dan melibatkan mereka dalam pembangunan. Pemerintah Desa Tropodo di Distrik Krian memprioritaskan kesehatan dan pendidikan dalam anggaran tahun 2020 mereka, sesuai dengan strategi ini. Dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan digunakan untuk membangun prasekolah, taman kanak-kanak, dan fasilitas pendidikan anak usia dini lainnya. Sebagian anggaran dialokasikan untuk inisiatif terkait kesehatan seperti program pencegahan stunting, pos kesehatan desa (Polindes), dan pos kesehatan terpadu (Posyandu). Dedikasi pemerintah desa untuk menurunkan angka stunting ditunjukkan oleh dukungan pendanaan ini. Berikut ini juga disampaikan oleh Haris Iswandi, S.Pt., Kepala Desa Tropodo:

“Kita selalu mensupport dalam artian kegiatan atau keuangan yang berhubungan dengan stunting, dan juga masalah keuangan, pendanaan kita juga support, jadi prioritas saya dulu si kesehatan dan pendidikan, kalau tantangan pengolahan dana, karna dana itu kan mengambil dari dana desa, kita biasanya berembuk dengan pendamping desa, lokal desa Pak Ali Mustofa, sehingga biasanya kita berdiskusi dengan beliau, terkait masalah dana untuk kesehatan. Kebanyakan mereka itu kan pengajuan-pengajuan itu mesti banyak dan tinggi, sedangkan keuangan kita tidak bisa men-cover semua yang dimau sama mereka, jadi kita memakai skala prioritas, prioritas mana yang harus kita dulu kan, walaupun semuanya penting, karena terbatasnya dana mau tidak mau, harus dipotong yang bisa di geser. Kalau dana desa untuk benar-benar pencegahan stunting ya kurang, karna kan kita tidak terfokus pada satu kegiatan saja” (Hasil Wawancara Tanggal 13 Agustus 2024).

Ibu Ima, seorang kader Posyandu dan kader pemberdayaan masyarakat, menyampaikan hal ini sebagai tambahan dari wawancara dengan Bapak Haris S., PT. Ungkapannya adalah:

“Anggaran dana yang kita butuhkan kayak rembuk stunting gitu kan, kita ajukan, contoh seperti ini kayak ada balita kita Dee dirasa gizinya kurang terus kayak stunting seperti itu kita ajukan ke balai desa, memang dana desa APBDes itu kan 20% untuk kesehatan, dana sudah sesuai apa yang direncanakan alhamdulillah, jadi sudah ada plot-plot, oh ini nanti targetnya satu anak balita gizinya kurang itu berapa ribu rupiah, terus dana yang di berikan untuk pencegahan stunting berapa nanti kita pikir oh dananya segini kita berikan apa biar dananya pas seperti itu di rupakno” (Hasil Wawancara Tanggal 09 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, diketahui ketersediaan anggaran dalam penanganan stunting masih terbatas. Kondisi tersebut menjabarkan dukungan pendanaan di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, belum sepenuhnya optimal dalam menunjang pelaksanaan program secara maksimal. Keterbatasan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas program pencegahan stunting, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengalokasian dana yang lebih tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berikut merupakan data ketersediaan anggaran:

C. **Tabel 2.** Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Pencegahan Stunting di Tropodo

No	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	Komsunsi Posyandu (56 Bayi x 8 Post x 12 Bulan)	Rp. 48.000.000,00
2.	Biaya Transportasi Kader 56 orang	Rp. 33.600.000,00
3.	PMT Khusus Stunting	Rp. 21.000.000,00
4.	Kelas Ibu Hamil	Rp. 3.475.000,00
5.	Kunjungan Balita Stunting	Rp. 4.000.000,00

Sumber: Data Diolah Oleh Pemerintah Desa Tropodo Krian (2024)

Berdasarkan hasil penelitian, pada indikator ketersediaan anggaran, pemerintah Desa Tropodo melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengawasi dan mendistribusikan dana desa. Anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program pencegahan stunting jelas mencerminkan hal ini. Pengeluaran untuk hal-hal seperti kelas prenatal, kunjungan ke balita yang mengalami stunting, biaya transportasi untuk kader, suplementasi makanan untuk anak-anak yang mengalami stunting, dan Posyandu (pos layanan kesehatan terpadu) untuk balita semuanya tercakup dalam anggaran desa. Pemerintah desa berupaya keras untuk memastikan program pencegahan stunting dapat terus berlanjut dengan pemanfaatan anggaran ini.

Gambar 1. Kegiatan Kelas Ibu Hamil



Sumber: Pemerintah Desa Tropodo (2024)

Sebagai upaya pemerintah desa untuk terlibat dalam pencegahan stunting, gambar tersebut menggambarkan kelas untuk ibu hamil. Program ini dimungkinkan berkat alokasi dana desa dari pemerintah desa. Dukungan anggaran sudah baik, namun masih belum cukup dana untuk sepenuhnya melaksanakan program pencegahan stunting. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Desa Tropodo harus meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dalam berbagai cara, termasuk pengelolaan anggaran. Selain itu, sangat penting agar pemerintah desa mampu mengkomunikasikan fakta keuangan kepada masyarakat secara bebas dan jujur, termasuk pendapatan dan pengeluaran, dalam bentuk laporan yang transparan. Kami berharap kinerja pemerintah desa akan meningkat dengan akuntabilitas yang baik, dan pengelolaan dana desa akan menjadi tanda kepercayaan masyarakat [13].

Dari temuan studi di lapangan ada persamaan terhadap hasil “*Peran Pemerintah Desa Ko’olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan*”. Yang dilakukan oleh Suhroh dan Pradana dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Bangkalan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18.000.000 untuk mendukung program Gopo (Gojek Posyandu). Namun, meskipun anggaran tersebut sudah tersedia, jumlahnya masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan program. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan program masih bergantung pada swadaya masyarakat supaya bisa berlangsung secara optimal. Kemudian, belum terdapat alokasi anggaran khusus yang secara spesifik diperuntukkan bagi program Gopo posyandu, sehingga pendanaan program belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, indikator ketersediaan anggaran dalam peran Pemerintah Desa Tropodo terhadap pencegahan stunting pada dasarnya telah sejalan dengan teori Yeti Heryati (2014). Hal ini terlihat dari pengelolaan anggaran desa yang diambil dari APBD dan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, anggaran juga telah dimanfaatkan sebagai alat pendukung kinerja dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari adanya alokasi

dana desa pada sektor prioritas, khususnya pendidikan dan kesehatan, termasuk berbagai program pencegahan stunting yakni posyandu, transportasi kader, pemberian PMT, kelas ibu hamil, serta kunjungan kepada balita stunting. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, ketersediaan anggaran masih menghadapi keterbatasan, sehingga belum dapat difokuskan secara maksimal pada satu program tertentu. Pemerintah desa masih harus menetapkan skala prioritas dalam penggunaan dana yang tersedia. Dengan demikian, meskipun secara mekanisme dan fungsi sudah sesuai dengan teori, indikator ini belum sepenuhnya optimal dari segi kecukupan dan efektivitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam perencanaan, akuntabilitas, serta penguatan alokasi anggaran agar upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal.

D. Kemitraan

Merujuk pada teori dari Heryati (2014), kemitraan ialah salah satu prinsip dalam GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar tercipta kerja sama yang harmonis dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kemitraan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kinerja implementasi program, karena keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan, koordinasi, serta kerja sama antar pihak yang terlibat. Dalam konteks pencegahan stunting, pemerintah desa perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak agar program dapat berjalan secara efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Tropodo telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak dalam upaya pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Tropodo.

“Sebenarnya itu kalau stunting itu program kabupaten berarti ke kecamatan juga, dan juga puskesmas, ya akhirnya kita dari puskesmas akhirnya ada bidan desa, nah bidan desa itulah kita bisa berkolaborasi, dengan kader-kader kesehatan dan pihak puskesmas, seperti itu, maknanya kadang-kadang kalau saya bilang Tropodo itu cerewet memang iya. Dari pihak puskesmas sendiri juga bergerak memberikan edukasi tentang pola asu makanan atau pola gizi, jadi sudah di support sama desa juga di support sama pihak dinas kesehatan. Kita juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Desa (BPD) untuk mengawasi kegiatan pencegahan stunting” (Hasil Wawancara Tanggal 13 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh penjabaran yang disampaikan oleh Mas Donyy yang menjabat sebagai Kasih Pelayanan:

“Yang dimaksud kemitraan itu yang mengawasi kita dalam menjalankan program. Seperti di Pemerintah desa Tropodo kita bekerja sama dengan Badan Pengawas Desa (BPD) untuk mengawasi kegiatan kita salah satunya ya kegiatan pencegahan stunting, trus kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu kader, karena kan suatu program pencegahan stunting ini kita melibatkan ibu-ibu kader dan bidan desa untuk melakukan kegiatan posyandu lalu bekerja sama dengan dinas kesehatan” (Hasil Wawancara Tanggal 09 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan staf pelayanan, diketahui bahwa Pemerintah telah melangsungkan kolaborasi atau kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan stunting. Adanya kemitraan ini memberikan dorongan positif yang menjadikan program yang dirancang bisa berlangsung secara lebih baik dan efektif. Berikut ialah kegiatan Desa Tropodo yang melangsungkan kemitraan bersama bidan desa, puskesmas dan pihak kesehatan.

Gambar 2. Kegiatan Kemitraan



Sumber: Pemerintah Desa Tropodo (2024)

Temuan menunjukkan bahwa indikator kerja sama Pemerintah Desa Tropodo telah berfungsi dengan memuaskan. Pemerintah desa membutuhkan bantuan dari kelompok lain untuk melaksanakan program pencegahan stunting. Bidan desa, dinas kesehatan, puskesmas, dan kader pos kesehatan terpadu (Posyandu) semuanya terlibat dalam kemitraan ini. Dinas kesehatan menyebarluaskan informasi tentang pengasuhan anak dan gizi, kader mengawasi kegiatan Posyandu, dan bidan desa memantau perkembangan balita. Pembentukan layanan kesehatan di Desa Tropodo dapat

dilakukan lebih efisien sebagai hasil dari kolaborasi ini. Fakta bahwa kelompok-kelompok ini bekerja sama menunjukkan bahwa mereka semua berkomitmen untuk memastikan layanan publik masyarakat sesuai standar.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu oleh Azizah dan Agustin (2022) berjudul “Peran Desa dalam Menekan Stunting sebagai Upaya Pencapaian SDGs Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kemitraan antara pemerintah desa, petugas kesehatan, kader kesehatan, dan rumah sakit dalam upaya penurunan stunting. Pemerintah desa berperan dalam penyediaan fasilitas dan koordinasi program, petugas kesehatan memberikan layanan gizi, kader melakukan pendataan perkembangan balita, serta rumah sakit memberikan edukasi terkait stunting.

Berdasarkan fenomena tersebut, indikator kemitraan dalam peran Pemerintah Desa Tropodo dapat dikatakan telah sesuai dengan teori Yeti Heryati (2014). Hal ini terlihat dari adanya kolaborasi bersama berbagai pihak, yakni puskesmas, bidan desa, kader posyandu, Dinas Kesehatan, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap pihak memiliki peran yang jelas, mulai dari edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan balita, pelaksanaan posyandu, hingga pengawasan program. Kolaborasi ini menunjukkan adanya koordinasi dan dukungan lintas sektor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program pencegahan stunting. Dengan demikian, indikator kemitraan dapat dinilai telah berlangsung cukup baik dan relevan terhadap teori, meskipun masih perlu adanya penguatan koordinasi serta keberlanjutan kerja sama agar target penurunan stunting dapat tercapai secara optimal.

E. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek dan objek kebijakan pemerintah, oleh karena itu keterlibatan masyarakat adalah sudut pandang utama masyarakat, menurut teori Yeti Heryati (2014). Sebagai subjek dan tujuan kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakannya, keterlibatan masyarakat sangat dihargai karena potensinya untuk memaksimalkan peran pemerintah. Tujuan pemerintah desa Tropodo adalah agar keterlibatan masyarakat ini dapat membantu mencegah stunting. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Tropodo, Krian, Bapak Haris S. Pt. memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kendala kita sebenarnya gini orang tua, anak yang tidak mau bekerja keras untuk anaknya, pola asuh nya itu nek kalau mau ya sudah, sedangkan tidak seperti itu, yaopo carane anak itu makan, kalau tidak mau ya yaopo balik lagi cara anak itu mau makan dengan pola gizi yang sehat, tapi kadang-kadang ibu itu akan kalau anaknya tidak mau sudah dibiarkan, sebenarnya itu yang menjadi kendala atau menjadi PR, sampai saya usul di puskesmas krian pada waktu ada dinas kesehatan Sidoarjo yaopo buk kalau yang menyuapi itu bapak, akhirnya semuanya protes, ya karna ibunya sudah ngk mau, akhirnya saya yang menyarankan gerakan suap bapak-bapak, kadang juga banyak ibu-ibu yang bekerja jadi ya dijarno mau makan atau tidak, ibu yang bekerja sudah kalau posyandu kadang tidak datang ya seperti itulah” (Hasil Wawancara Tanggal 13 Agustus 2024).

Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh penjabaran yang disampaikan oleh ketua kader yang ada yakni Bu Dian. Beliau menjabarkan:

“Partisipasi masyarakat ya dengan datang ke posyandu, gini mbak orang tua balita kadang sibuk kerja, anaknya ditiptikan ke mbahnya dan mbahnya sudah tua yang mengakibatkan tidak bisa datang ke posyandu,, telak posyandu dengan tempat tinggal warga ya dekat, tetapi ada yang masih jauh yang mengakibatkan mereka malas datang ke posyandu” (Hasil Wawancara Tanggal 17 Mei 2024).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan Ketua Kader Posyandu, Ibu Dian, diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting ditunjukkan melalui keikutsertaan mereka dalam kegiatan posyandu. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu indikator keterlibatan aktif dalam mendukung program kesehatan. Partisipasi masyarakat ini memiliki peran penting karena menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting secara efektif. Melalui kehadiran di posyandu, masyarakat dapat memantau tumbuh kembang balita, memperoleh edukasi terkait gizi, serta mendapatkan layanan kesehatan secara langsung. Berikut merupakan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting melalui keikutsertaan di posyandu.

Gambar 3. Kegiatan Posyandu



F. Sumber: Pemerintah Desa Tropodo (2024)

Dari temuan penelitian tersebut bisa dijabarkan bahwa indikator partisipasi masyarakat pada pencegahan stunting sudah tergolong baik. Temuan tersebut terlihat dari kehadiran masyarakat pada kegiatan posyandu yang dilaksanakan rutin setiap bulan, sehingga memungkinkan pemantauan tumbuh kembang balita serta pemberian vitamin sebagai upaya pencegahan stunting. Tetapi, masih ada kendala, yakni pola asuh ibu yang kurang tepat, misalnya membiarkan anak tidak makan yang berdampak pada kurangnya asupan gizi balita. Selain itu, masih ada masyarakat yang kurang aktif datang ke posyandu karena rendahnya kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting. Temuan tersebut sejalan terhadap studi terdahulu oleh Fina Aura Regita dan Ananta Prathaman (2023) di Desa Wedoro, yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran serta keterbatasan dalam beradaptasi dengan program berbasis teknologi. Dengan demikian, meskipun partisipasi masyarakat di Desa Tropodo sudah cukup baik, masih diperlukan peningkatan edukasi dan kesadaran agar keterlibatan masyarakat dapat lebih optimal dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa indikator Partisipasi Masyarakat dalam peran Pemerintah Desa Tropodo terhadap pencegahan stunting secara umum telah cukup relevan terhadap teori yang dijabarkan Yeti Heryati (2014), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan posyandu yang dilangsungkan rutin tiap bulan, di mana orang tua membawa balita untuk dipantau pertumbuhan, diberikan vitamin, serta memperoleh edukasi gizi sebagai upaya pencegahan stunting. Kehadiran masyarakat tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap kebijakan pemerintah desa. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran sebagian orang tua dalam pola asuh dan pemenuhan gizi anak, kesibukan bekerja sehingga tidak menghadiri posyandu, serta sikap permisif terhadap anak yang sulit makan. Dengan demikian, indikator partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup sesuai dengan teori, tetapi masih memerlukan peningkatan kesadaran, edukasi, dan penguatan peran keluarga agar program pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, Pemerintah Desa Tropodo di Krian telah aktif terlibat dalam upaya memerangi stunting. Empat indikator utama menunjukkan hal ini benar. Meskipun masih ada beberapa kendala, termasuk kekurangan kursi dan tidak dapat menggunakan rumah warga, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, termasuk alat pengukur tinggi badan, timbangan, meja, kursi, dan perlengkapan vaksinasi, telah terpenuhi. Selanjutnya, program pencegahan stunting belum sepenuhnya terlaksana karena kurangnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah desa. Ketiga, keberhasilan program ini didukung oleh kolaborasi pemerintah desa dengan berbagai pihak, termasuk kader Posyandu dan bidan setempat. Terakhir, partisipasi dalam kegiatan Posyandu merupakan cara lain bagi masyarakat untuk terlibat. Sayangnya, tidak semua warga memahami pentingnya pencegahan stunting dan karenanya tidak aktif membawa balita mereka ke Posyandu. Secara keseluruhan, meskipun sudah berjalan cukup baik, masih diperlukan peningkatan di beberapa aspek agar upaya pencegahan stunting dapat lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo" disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam proses penyusunannya, peneliti menghadapi berbagai kendala, namun dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tropodo, Krian, kader Posyandu, dan tim pengelola program pencegahan stunting. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta kepada teman-teman yang turut memberi semangat hingga penelitian ini selesai.

REFERENSI

- [1] Z. Al Faiqah and S. Suhartatik, "Peran Kader Posyandu Dalam Pemantauan Status Gizi Balita: Literature Review," *Journal of Health, Education and Literacy (J-Health)*, pp. 19-25, 2022.

- [2] Y. Haskas, "GAMBARAN STUNTING DI INDONESIA: LITERATUR REVIEW," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, pp. 154-157, 2020.
- [3] D. J. Hoffman, A. L. Sawaya, I. Verreschi, K. L. Tucker and S. B. Roberts, "Why are nutritionally stunted children at increased risk of obesity? Studies of metabolic rate and fat oxidation in shantytown children from São Paulo, Brazil," *American Society for Clinical Nutrition*, pp. 702-707, 2000.
- [4] I. Picauly and S. M. Toy, "ANALISIS DETERMINAN DAN PENGARUH STUNTING TERHADAP PRESTASI BELAJAR ANAK SEKOLAH DI KUPANG DAN SUMBA TIMUR, NTT," *Jurnal Gizi dan Pangan*, pp. 55-62, 2013.
- [5] R. R. Garis, "ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, pp. 108-130, 2017.
- [6] K. Rahmadhita, "Permasalahan Stunting dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, pp. 225-229, 2020.
- [7] R. Fitri, N. Huljannah and T. N. Rochmah, "PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI INDONESIA: A SYSTEMATIC REVIEW," *National Nutrition Journal*, pp. 281-292, 2022.
- [8] I. H. Purnamasari and E. Priyanti, "Collaborative governance dalam penanganan stunting," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, pp. 383-391, 2021.
- [9] R. Sofiah, S. and R. Hidayah, "Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, pp. 1-18, 2020.
- [10] F. A. Regita, A. Prathama, P. Studi, A. Publik, F. Ilmu, and I. Politik, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi," vol. 12, no. 1, pp. 27-40, 2023.
- [11] L. Suhroh and G. W. Pradana, "Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Online Unesa*, pp. 93-104, 2021.
- [12] T. N. Azizah and I. F. Agustina, "Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGs Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *Archive Umsida*, pp. 1-9, 2023.
- [13] M. A. Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Islamic Finance and Accounting*, pp. 67-82, 2020.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.